



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BINJAI



TAHUN 2025 – 2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai 2025 -2029, sebagai penjabaran RPJMD Kota Binjai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai disusun sejalan dengan disahkannya Peraturan Walikota Binjai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai. Rencana Strategis ini juga memperhatikan dan mempedomani Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan ini kami berupaya menganalisis faktor-faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan harapan dapat menggambarkan kondisi obyektif sehingga langkah –langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan langkah riil sesuai dengan kondisi yang ada.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik berupa saran maupun kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Harapan kami semoga Rencana Strategis yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik



**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI**

**ERWIN TOGA TP. PURBA, S.Sos, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681210 198910 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi BPKPD Kota Binjai	9
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
2.1.2 Struktur Organisasi.....	11
2.1.3 Sumber Daya Manusia.....	14
2.1.4 Sarana dan Prasarana.....	16
2.1.5 Kinerja Pelayanan BPKPD Kota Binjai.....	16
2.1.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKPD Kota Binjai.....	20
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis BPKPD Kota Binjai	21
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ..	21
2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	23
2.2.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan	24
2.2.4 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi	26
2.2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
2.3 Penentuan Isu-isu Strategis	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan Renstra BPKPD Kota Binjai.....	35
3.2. Sasaran Renstra BPKPD Kota Binjai	36
3.3. Strategi BPKPD Kota Binjai dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra	38
3.4. Arah Kebijakan BPKPD Kota Binjai dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra	40

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGA-
RAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan..... 42
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 52

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kaidah Pelaksanaan 75
- 5.2. Pelaksanaan Pengendalian 75
- 5.3. Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 75

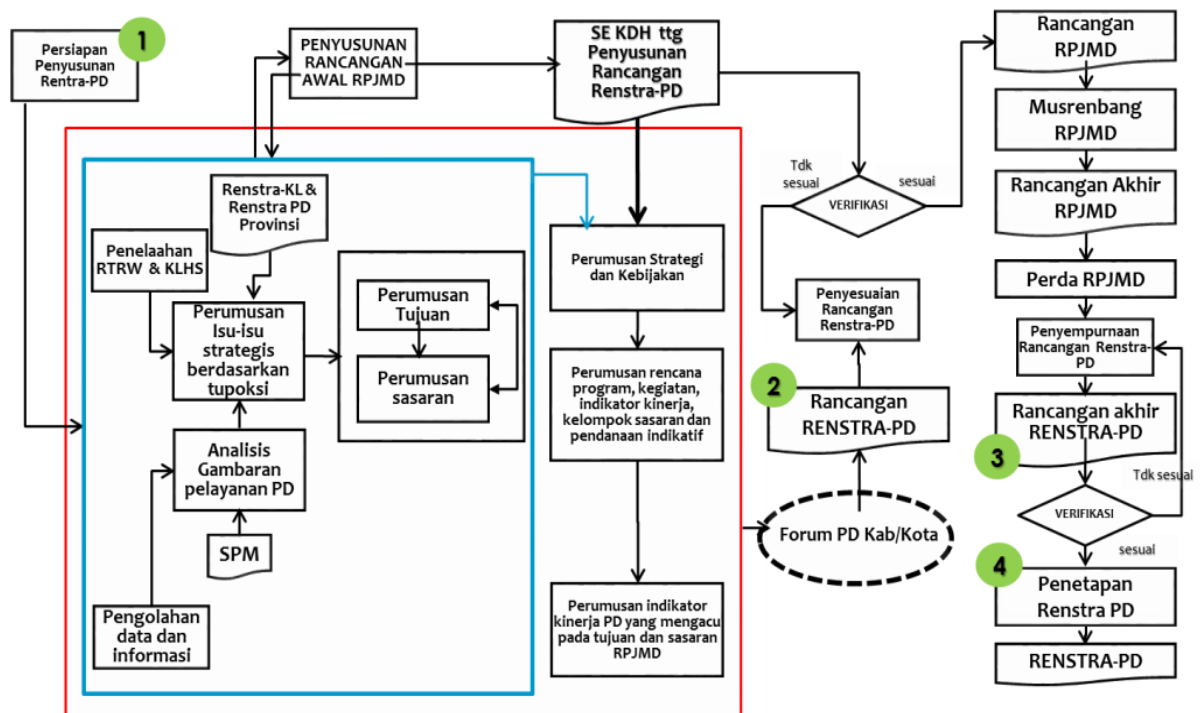
BAB I**PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; pada Pasal 111 mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Kota Binjai berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Binjai untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan Renstra perubahan ini berpedoman pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029

Permasalahan Umum yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) yang masih terus dalam proses pembaruan, modifikasi dan evaluasi (maintenance), Banyaknya aset tanah dan bangunan milik daerah yang belum memiliki legalitas kepemilikan, dan belum optimalnya penggalan potensi pendapatan daerah. Permasalahan-permasalahan umum tersebut jika disimpulkan akan memunculkan permasalahan pokok sebagai berikut :

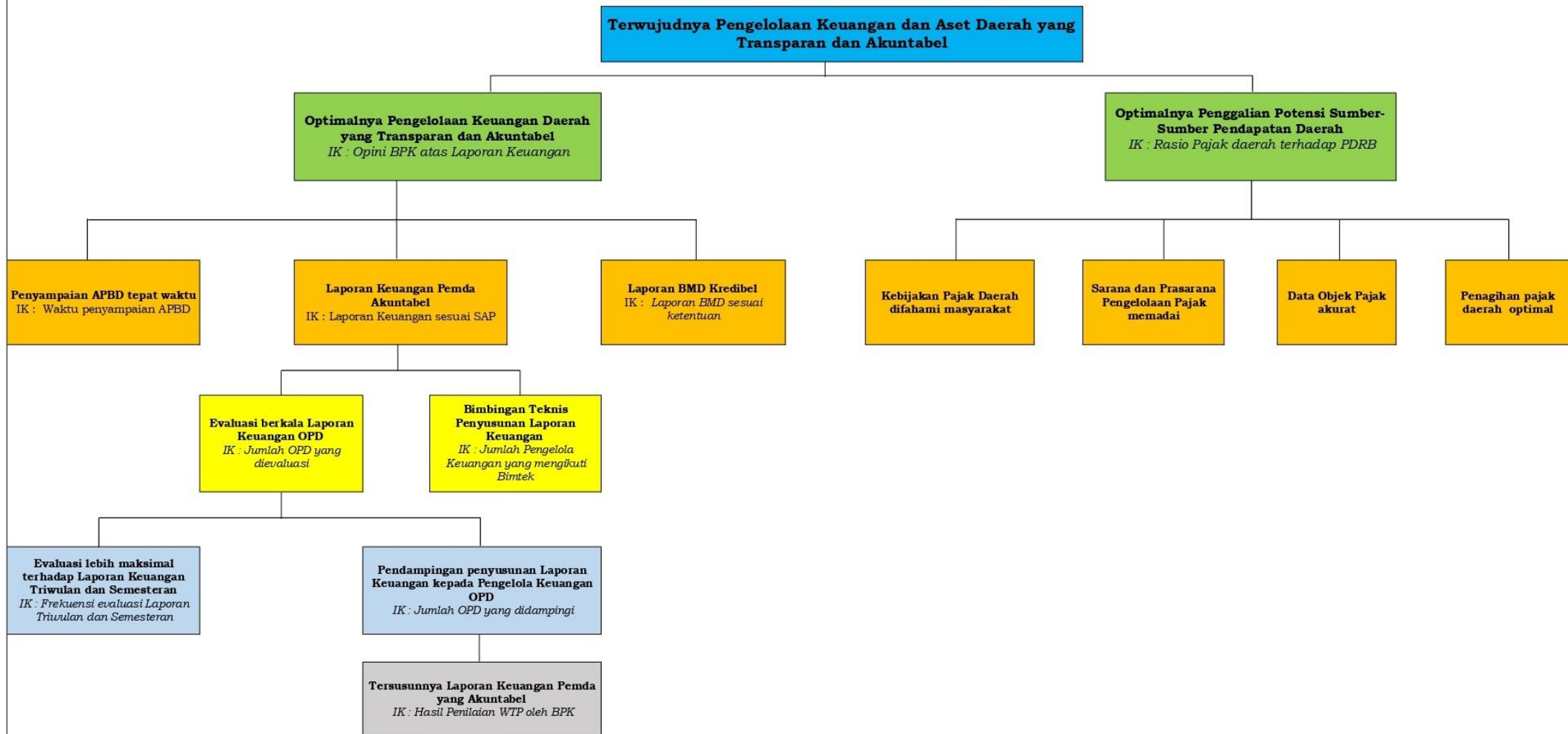
1. Penguasaan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) tidak optimal
2. Sertifikat aset tanah dan bangunan milik Pemko tidak dapat diterbitkan
3. Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah rendah

Dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai ini diharapkan seluruh permasalahan yang dihadapi akan dapat diatasi secara komprehensif.

Melihat dari latar belakang di atas dapat dijelaskan fungsi dan tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai sesuai dengan Pohon Kinerja berikut :

POHON KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI



1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra BPKPD Kota Binjai Tahun 2025-2029 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binja Nomor 53);

9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 17);
11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 9);.
12. Surat Edaran Walikota Binjai Nomor 100.3.2-4516 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan Renstra BPKPD Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah gambaran rencana pelaksanaan pembangunan BPKPD Kota Binjai selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan renstra ini khususnya adalah:

1. Mengidentifikasi (review) secara menyeluruh kondisi BPKPD Kota Binjai melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu.
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi BPKPD Kota Binjai Tahun 2025-2029.
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan BPKPD Kota Binjai Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan Renstra BPKPD Kota Binjai tahun 2025-2029 ini adalah agar dapat:

1. Teridentifikasinya kondisi BPKPD Kota Binjai melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;
2. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan BPKPD Kota Binjai Tahun 2025-2029;
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPKPD Kota Binjai Tahun 2025-2029 berdasarkan kerangka pendanaan indikatif.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Renstra BPKPD) Kota Binjai Tahun 2025-2029, disusun melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPKPD Kota Binjai. Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPKPD Kota Binjai, telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Binjai, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Binjai Tahun 2010-2030, telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga, serta penentuan isu-isu strategis BPKPD Kota Binjai.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKPD Kota Binjai, strategi dan arah kebijakan BPKPD Kota Binjai dalam lima tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, kinerja BPKPD Kota Binjai yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Perubahan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

Berisi ringkasan perubahan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra BPKPD Tahun 2025-2029

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH****2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BPKPD KOTA
BINJAI**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Binjai dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang.

2.1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai, mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang merupakan
- e. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, pendapatan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tata laksana kantor;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan PBB, BPHTB, retribusi dan pajak daerah lainnya;
- h. Melakukan koordinasi penyusunan rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengembangannya (ekstensifikasi/intensifikasi);
- i. Menyiapkan rencana kebijakan dan atau strategi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembayaran penagihan PBB, BPHTB, Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Daerah;
- k. Melaksanakan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- l. Pelaksanaan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Pelaksanaan pengujian atas penagihan dan memerintahkan pembayaran;
- n. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- o. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- p. Melaksanakan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu:

- 1. Aspek administrasi Keuangan Daerah, tugasnya meliputi:
 - a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administrasi pengendalian dan koordinasi belanja daerah;
 - b. Pengkajian kebutuhan daerah;
 - c. Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dibidang pendapatan dan belanja daerah;
 - e. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan dan aset daerah;
 - f. Pembinaan dan bimbingan di bidang pendapatan, belanja dan aset daerah.
2. Aspek Pendapatan Daerah, tugasnya meliputi:
- a. Melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang pendapatan;
 - b. Menyelenggarakan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di bidang pendapatan;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan.
3. Aspek Pengelolaan Aset Daerah, tugasnya meliputi:
- a. Penyusunan perumusan, perencanaan bidang aset daerah;
 - b. Koordinasi perencanaan analisa kebutuhan pengadaan aset, pendataan, penginventarisasian dan pencatatan aset;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah;
 - d. Penyusunan database aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Binjai;
 - e. Penyusunan laporan realisasi dan kinerja dibidang aset daerah.

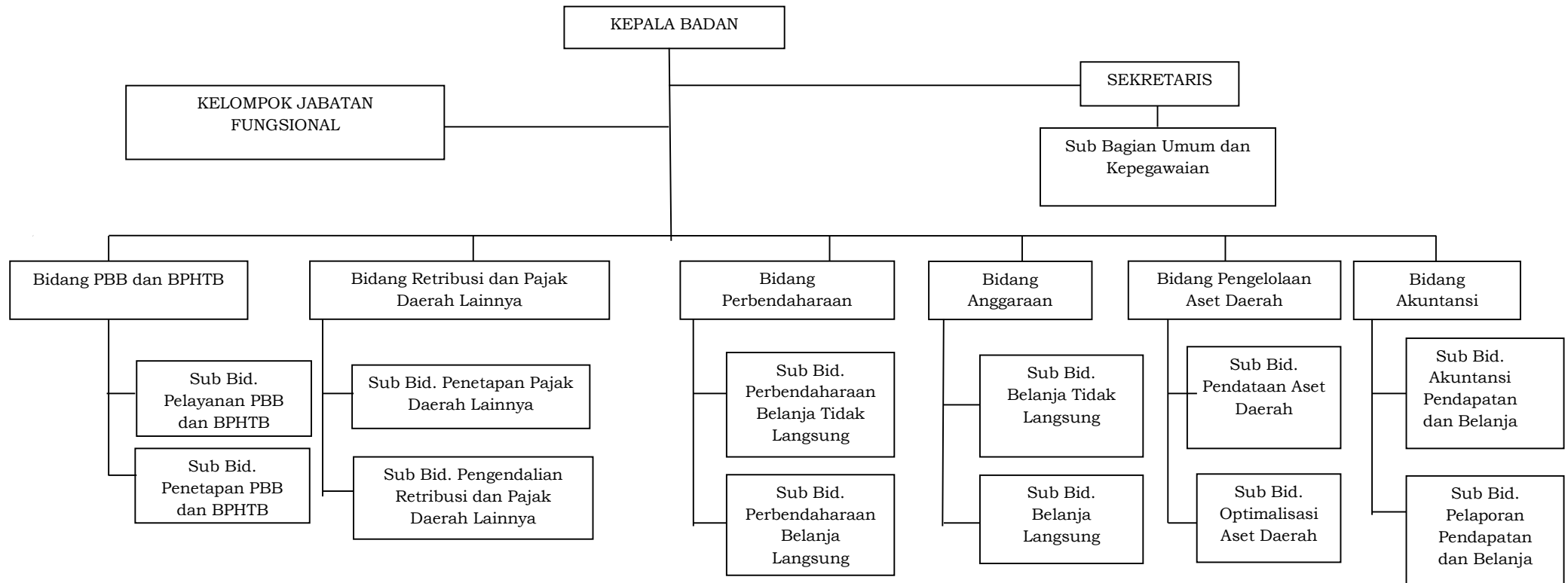
2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi BPKPD Kota Binjai terdiri dari :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a) Subbidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung;
 - b) Subbidang Perbendaharaan Belanja Langsung.
- 4. Bidang Anggaran, terdiri dari:

- a) Subbidang Belanja Tidak Langsung;
- b) Subbidang Belanja Langsung.
- 5. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - a) Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
 - b) Subbidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja.
- 6. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
 - a) Subbidang Pelayanan PBB dan BPHTB;
 - b) Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB.
- 7. Bidang Retribusi dan Pajak Daerah lainnya, terdiri dari:
 - a) Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - b) Subbidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.
- 8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a) Subbidang Pendataan Aset Daerah;
 - b) Subbidang Optimalisasi Aset Daerah.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Bagan 2.1.
Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai



2.1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPKPD Kota Binjai didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada Tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara BPKPD Kota Binjai adalah sebanyak 90 orang. Jumlah dan komposisi pegawai BPKPD Kota Binjai dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1**Jumlah dan Distribusi Pegawai BPKPD Kota Binjai Tahun 2025**

No	Struktur Jabatan/Kepegawaian	Kondisi Saat Ini		
		Jumlah	Status	Pendidikan
1.	Kepala Badan	1	PNS	S2 Studi Pembangunan
2.	Sekretaris	-	-	-
	• Subbag Umum dan Kepegawaian	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	-	-	-
	• Perencana Ahli Muda	-	-	-
	• Staf	11	PNS	S1/S2/SMA
		1	PPPK	SMA
3	Kabid Anggaran	1	PNS	S2/Manajemen
	• Kasubbid Belanja Tidak Langsung	1	PNS	S1/Teknik Industri
	• Kasubbid Belanja Langsung	1	PNS	STIE Pelita Bangsa Binjai
	• Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	-	-	-
	• Staf	6	PNS	SMA/Sarjana
		1	PPPK	S1
4	Kabid Perbendaharaan	1	PNS	S2/Akuntansi
	• Kasubbid Perbendaharaan BTL	1	PNS	S1/Ilmu Pemerintahan
	• Kasubbid Perbendaharaan BL	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	PNS	S1/Manajemen
	• Staf	11	PNS	SMA/Sarjana
5	Kabid Akuntansi	1	PNS	S1/Akuntansi
	• Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Belanja	1	PNS	S1/Akuntansi
	• Kasubbid Pelaporan Pendapatan dan Belanja	1	PNS	S1/Ekonomi

No	Struktur Jabatan/Kepegawaian	Kondisi Saat Ini		
		Jumlah	Status	Pendidikan
	• Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	-	-	-
	• Staf	8	PNS	SMA/Sarjana
6	Kabid PBB dan BPHTB	1	PNS	S1/Ilmu Hukum
	• Kasubbid Pelayanan PBB dan BPHTB	1	PNS	S1/Teknik Industri
	• Kasubbid Penetapan PBB dan BPHTB	-	-	-
	• Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	PNS	S1/Ilmu Hukum
	• Staf	12	PNS	SMA/Sarjana
		1	PPPK	SMA
7	Kabid Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya	-	-	-
	• Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	PNS	S1/Ilmu Pemerintahan
	• Kasubbid Penetapan Pajak Daerah Lainnya	1	PNS	DIII/Administrasi Perpajakan
	• Kasubbid Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya	1	PNS	S1/Akutansi
	• Staf	7	PNS	SMA/Sarjana
		1	PPPK	D3
8	Kabid Pengelolaan Aset Daerah	1	PNS	S2/Manajemen
	• Kasubbid Pendataan Aset Daerah	1	PNS	S1/Ekonomi
	• Kasubbid Optimalisasi Aset Daerah	1	PNS	DIII/Administrasi Perpajakan
	• Penilai Pemerintah Ahli Muda	1	PNS	S2 Penilaian Aset
	• Staf	9	PNS	SMA/Sarjana
9	Pegawai Tidak Tetap	89	Non PNS	SMA/Sarjana

Sumber : Data Subbag. Umum dan Kepegawaian BPKPD Kota Binjai, 2025

Tabel 2.2.

ASN BPKPD Kota Binjai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	68
3	Golongan II	14

Jumlah	90
---------------	----

Sumber : Data SubbagUmum dan Kepegawaian BPKPD Kota Binjai, 2025

Tabel 2.3.

ASN BPKPD Kota Binjai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	1
2	S2	8
3	Sarjana	58
4	Akademi/D3	8
5	SLTA	15
	Jumlah	90

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPD Kota Binjai, 2025

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.4. SARANA DAN PRASARANA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai memiliki sarana dan prasarana antara lain bangunan fisik berupa gedung yang memiliki 2 (dua) lantai yang bertempat di Jalan Jambi Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan. Selain itu untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas kedinasan, BPKPD memiliki barang-barang inventaris seperti komputer, laptop, printer, lemari filing cabinet, meja, kursi, sofa, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua untuk menunjang pekerjaan maupun pelayanan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah Kota Binjai.

2.1.5. KINERJA PELAYANAN BPKPD KOTA BINJAI

Secara garis besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKPD Kota Binjai, kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut;

1. Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

2. Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD;
3. Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
4. Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
5. Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan belanja tidak langsung PPKD sesuai dengan ketentuan;
6. Terlaksananya pengelolaan Belanja Hibah dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan;
7. Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya;
8. Terlaksananya pendampingan penyusunan laporan keuangan PD se-Kota Binjai;
9. Kelancaran dan peningkatan kualitas jaringan SIMDA Keuangan;
10. Tersusunnya pertanggungjawaban APBD Kota Binjai;
11. Terinventarisasinya tanah milik pemerintah Kota Binjai;
12. Terlaksananya penghapusan barang-barang inventaris dan bangunan/gedung milik Pemerintah Kota Binjai;
13. Terlaksananya bimtek penilaian barang milik daerah;
14. Terlaksananya operasi sisir dan operasi pencapaian target;
15. Terlaksananya pemutkahiran data peta PBB Kota Binjai;
16. Terpeliharanya sistem IT PBB dan PAD (SIMPARDA);
17. Terlaksananya operasi penertiban pajak daerah;
18. Terdatanya potensi pajak daerah;
19. Terlaksananya TPTGR Kota Binjai

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, pencapaian kinerja pembangunan dan pelayanan BPKPD Kota Binjai kepada masyarakat selama periode 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
Tahun	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
BPKPD	32.547.816.290	24.703.137.639	27.767.804.244	25.755.134.212,25	20.765.187.393	21.381.381.509	22.767.804.244	24.860.371.975,82	63,8 %	86,55 6%	82,24 6%	96,5 %	-1.698.170.519,43	1.023.796.145,7

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BPKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BPKPAD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Indikator Kinerja Utama															
1	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas					80,00%	85,00%	90,00%	93,36%	93,36%	82,24%	96,50%		116,70%	96,75%	107,22%
2	Menurunnya SiLPA terhadap APBD					0,018%	0,017%	0,016%		0,43%	0,049%	1,22%		2388,89%	288,24%	7625,00%
3	Opini BPK				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP		Sesuai	Tidak Tercapai	Sesuai	
4	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD					3,50%	3,75%	4,00%		3,42%	4,50%	3,60%		97,71%	120,00%	90,00%
5	Persentase PAD terhadap APBD				12,50%	19,00%	19,25%	19,50%	10,59%	12,73%	10,37%	12,14%	84,72%	67,00%	53,87%	62,26%
6	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah					3,00%	4,00%	5,00%		18,40%	3,14%	0,45%		613,33%	78,50%	9,00%

2.1.6 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPKPD KOTA BINJAI

Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPKPD Kota Binjai dalam lima tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi BPKPD namun jika tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada.

Tantangan yang masih dihadapi BPKPD Kota Binjai dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks;
2. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing;
3. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sehingga masih ada anggapan dan pola pikir dulu bisa dan tidak apa-apa kenapa sekarang tidak bisa;
4. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang dan antar Perangkat Daerah masih belum dapat dilakukan lebih intens;
5. Legalitas Aset Daerah yang sulit diidentifikasi;
6. Belum Optimalnya pengakuan terhadap *reward and punishment*;
7. Belum maksimalnya dukungan jaringan online;
8. Belum optimalnya dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Disamping tantangan diatas, masih terdapat peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas BPKPD Kota Binjai. Adapun beberapa **Peluang** dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Luasnya kewenangan yang dimiliki;
2. Adanya aturan tentang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang berbasis teknologi informasi;
4. Adanya petunjuk teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Adanya pembagian tugas yang terstruktur dalam menyelesaikan tugas dalam penyusunan laporan keuangan;
6. Sumber daya aparatur yang memilki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
7. Tersedianya SOP dan Standar Mutu Pelayanan.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKPD KOTA BINJAI

2.2.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Setelah dilakukan analisis secara seksama maka teridentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai dalam melakukan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Permasalahan yang paling nampak dihadapi saat ini diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbatasan Sumber Daya Aparatur yang menangani pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah	Kurangnya jumlah personil yang menangani pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah	Kuantitas Sumber Daya Aparatur belum terpenuhi sesuai dengan hasil analisis beban kerja di Perangkat Daerah
2	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) yang masih terus dalam proses pembaruan, modifikasi dan evaluasi (maintenance)	Pemahaman penggunaan SIPD belum maksimal	Tidak adanya petunjuk penggunaan (user manual) Aplikasi SIPD
3	Belum optimalnya penggalan potensi sumber pendapatan daerah	Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah lainnya rendah	Sumber pendapatan daerah belum tergali (tereksplore) maksimal
4	Masih rendahnya kemauan masyarakat dalam membayar PBB P2, Pajak dan Retribusi daerah lainnya	Target Pendapatan PBB P2, Pajak dan Retribusi daerah lainnya tidak tercapai	Pandangan skeptis masyarakat tentang pemanfaatan dana pajak
6	Sertifikat aset tanah dan bangunan milik Pemko tidak dapat diterbitkan	Banyaknya aset tanah dan bangunan milik Pemko yang belum bersertifikat	Aset tanah dan bangunan yang tidak ada legalitas kepemilikan awal

2.2.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi Walikota dan Wakil Walikota Binjai yang juga telah ditetapkan sebagai Visi Kota Binjai Tahun 2025-2029 yakni **“Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut telah ditetapkan 4 (empat) Misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2025 – 2029 yaitu sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan serta mendukung Makan Bergizi Gratis bagi anak didik TK, SD dan SMP;
- 2. Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan;
- 3. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan Lingkungan;
- 4. Mewujudkan penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif.

Dari ke empat Misi diatas, sesuai dengan tugas dan fungsinya Misi yang relevan sebagai acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai menyusun rencana strategisnya yakni Misi keempat **“Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif”**, dengan penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel. 2.7. Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD acuan Renstra BPKPD Kota Binjai

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan dan Keuangan Daerah	Return on Asset (ROA) BUMD
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan
		Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Persentase belanja operasional terhadap total belanja daerah
		Persentase kontribusi pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.3. TELAHAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KEUANGAN

Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai penggerak utama dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif.

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ***"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan Nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan

yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan lima sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.

5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

2.2.4.TELAAHAN RENSTRA K/L DAN PROVINSI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai sebagai Perangkat Daerah Kota Binjai, dalam melaksanakan tugasnya harus mendukung sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia, maupun sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai unit kerja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atas pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi, aset, uptd dan pembinaan kabupaten/kota, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dalam menjalankan kegiatannya berpedoman kepada visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagai penuntun dan penunjuk arah tujuan yang hendak dicapai, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu berkewajiban menunjang keberhasilan visi dan misi Pemprovsu dengan menyusun Rencana Strategis yang mengacu pada visi dan misi tersebut.

Bertitik tolak dari tugas, fungsi dan tanggungjawab Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dalam penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian administrasi perbendaharaan dan kas daerah, anggaran, akuntansi dan aset serta anggaran keuangan daerah

Kabupaten/Kota, sekaligus merupakan identitas masa depan, artikulasi citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan yang realistis dan kredibel serta menjadi budaya organisasi.

Selaras dengan itu, maka visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan asumsi dan persepsi yang berbeda, perlu dijelaskan hakekat yang terkandung dalam visi dimaksud sebagai berikut **“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, akuntabel dan transparan, berbasis teknologi informasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku “**

Dari penjelasan diatas dapat ditelaah bahwa arah strategi dan tujuan BKAD Provinsi Sumatera Utara telah sejalan dengan arah dan tujuan BPKPD Kota Binjai sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam Rencana Strategis BPKPD Kota Binjai Tahun 2025 - 2029.

2.2.5.TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategisnya mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap

kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Binjai Tahun 2020 - 2040 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 merupakan dokumen strategis yang mengatur arah pembangunan wilayah secara spasial dalam jangka panjang. Dokumen ini tidak hanya menetapkan struktur ruang dan pola ruang, tetapi juga mencantumkan arahan pengelolaan ruang yang memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Dalam

konteks tersebut, peran BPKPD menjadi krusial karena menyangkut dua dimensi utama: pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan ruang dan optimalisasi aset daerah sebagai bagian dari instrumen pengembangan wilayah.

Dalam dimensi keuangan, implementasi RTRW menuntut adanya pembiayaan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap program-program strategis. BPKPD berperan dalam merancang penganggaran berbasis ruang, memastikan kecukupan anggaran melalui alokasi APBD dan pengelolaan dana transfer dari pusat atau provinsi, serta mengawal efisiensi dan efektivitas belanja pembangunan agar selaras dengan arah tata ruang. Dengan demikian, kemampuan BPKPD dalam menyusun perencanaan pengeluaran publik yang responsif terhadap kebutuhan ruang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan RTRW.

Di sisi lain, aspek pengelolaan aset daerah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks tata ruang. RTRW Kota Binjai menetapkan kawasan-kawasan strategis, termasuk pusat-pusat pertumbuhan, kawasan perdagangan dan jasa, serta ruang terbuka hijau, yang sebagian besar bersinggungan langsung dengan aset daerah berupa tanah dan bangunan. BPKPD memiliki tanggung jawab untuk melakukan inventarisasi, pengamanan hukum, dan optimalisasi pemanfaatan aset-aset tersebut agar tidak hanya terjaga status hukumnya, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan wilayah.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan kelembagaan yang harus dihadapi oleh BPKPD dalam menjalankan peran ini, antara lain masih terbatasnya integrasi sistem informasi keuangan dan aset berbasis spasial, lemahnya koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta belum optimalnya penerapan perencanaan anggaran berbasis wilayah. Untuk itu, penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi sistem pengelolaan aset dan keuangan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi langkah yang perlu diprioritaskan. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan berbasis data spasial, peran BPKPD akan semakin signifikan dalam memastikan keterpaduan antara kebijakan tata ruang dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kota Binjai yang berkelanjutan.

2.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam hal penentuan isu-isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai kedalam pola analisis SWOT.

Untuk mencapai hasil konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang konseptual, analitis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Identifikasi dan analisa dilakukan dengan pendekatan SWOT yaitu berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal serta perpaduan diantara dua kondisi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Faktor Internal

1. Kekuatan/potensi (Strength)

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 3) Personil berasal dari unit yang membidangi urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- 4) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kelemahan (Weakness)

- 1) Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen, serta prasarana penunjang kerja berupa ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan secara optimal kepada pihak yang berkepentingan.

- 2) Terbatasnya alokasi anggaran guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik melalui sisitem online dan transparan.
- 4) Belum optimalnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- 5) Belum optimalnya transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.

Faktor Eksternal

1. Kesempatan/Peluang (Oportunity)

1. Belanja Daerah diatur untuk menyesuaikan kapasitas fiskal, dengan penekanan pada belanja produktif dan pembangunan infrastruktur
2. Kinerja Pendapatan Daerah Kota Binjai menunjukkan tren positif, meskipun fluktuasi tetap terjadi
3. Potensi penerimaan Kota Binjai didukung oleh sektor jasa, dan perdagangan
4. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
5. Adanya kesamaan tekad, pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah.

2. Tantangan/Ancaman (Treath)

- 1) Peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset daerah cenderung berubah-ubah dalam waktu cepat.
- 2) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good corporate governance.

- 3) Masih rendahnya kemampuan aparat pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut ketentuan yang berlaku.
- 4) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, pendapatan dan aset daerah semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

Penentuan Isu Strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai dilakukan dengan Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8. Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	14	18	18	14	8	18	90
2	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14	18	18	14	10	18	92
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	13	18	18	11	10	18	88
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	11	18	16	11	8	17	81
5	Pengelolaan Aset Daerah yang Efisien dan Produktif	11	18	17	12	8	18	84

Berdasarkan Nilai Skala Kriteria, maka penentuan isu strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai ke depan adalah:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel;
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah;
4. Pengelolaan Aset Daerah yang Efisien dan Produktif;
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Tabel 2.9. Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belanja Daerah diatur untuk menyesuaikan kapasitas fiskal, dengan penekanan pada belanja produktif dan pembangunan infrastruktur	* Belum optimalnya perencanaan keuangan, terutama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan BPKPD * Masih terjadi kesalahan pengajuan anggaran dan pembuatan laporan akibat kurangnya kapasitas teknis di PD	* Pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, untuk memperkuat kepercayaan publik * Perlunya penyesuaian pola belanja daerah yang mendukung ekonomi yang inklusif, dengan memperbesar proporsi belanja yang mendukung perlindungan lingkungan, pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan	* Perubahan iklim meningkatkan frekuensi bencana alam yang berdampak pada meningkatnya belanja daerah dalam mitigasi bencana * Meningkatnya produksi sampah mendorong pemerintah memastikan pendanaan yang memadai untuk program	* Peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan menjadi tantangan serius sehingga pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana * Perlunya mendorong	* Penguatan kualitas belanja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan * Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan public * Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung kinerja fiskal, termasuk melalui skema kerja sama pemanfaatan aset	* Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel * Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) * Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah * Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia * Pengelolaan Aset Daerah yang Efisien dan Produktif
Kinerja Pendapatan Daerah Kota Binjai menunjukkan tren positif, meskipun fluktuasi tetap terjadi	* Banyak aset Pemerintah Daerah yang belum disertifikasi atau tidak dimanfaatkan dengan baik,					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi penerimaan Kota Binjai didukung oleh sektor jasa, dan perdagangan	menyebabkan kerusakan atau ketidakrawatan asset *Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah lainnya masih rendah	* Perlunya memperhitungkan risiko perubahan iklim dalam penyusunan anggaran yang beradaptasi terhadap perubahan iklim di sektor infrastruktur dan sosial.	pengelolaan sampah, termasuk pemilahan di sumber, daur ulang, dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.	digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas * Banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal * Rasio perpajakan Indonesia menurun drastis dari sekitar 20% (tahun 1980-an) menjadi hanya sekitar 10,1% dari PDB pada 2024 * Menggali sumber pendanaan baru di luar APBN/APBD, misalnya melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), green financing, dan skema pembiayaan inovatif lainnya.	(KSP), sewa, atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)	

BAB III**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****3.1. Tujuan Renstra BPKPD Kota Binjai**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Binjai, misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) adalah yakni Misi keempat **“Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif”** Misi ini bertujuan untuk “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik” yang dijabarkan ke dalam sasaran “Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya”. Sasaran tersebut menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai.

Sejalan dengan sasaran dan tujuan dalam RPJMD Kota Binjai 2025-2029 dan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai menetapkan tujuannya adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”

Dengan penetapan tujuan ini, diharapkan BPKPD Kota Binjai mampu berperan aktif dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah, dan pendapatan daerah yang optimal, transparan dan akuntabel.

3.2. Sasaran Renstra BPKPD Kota Binjai

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai adalah:

1.Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah

2.Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berlandaskan tujuan dan sasaran pada RPJMD guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kapasitas Perencanaan dan Keuangan Daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel									
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah								
			Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah								
			Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	0,80%	0,80%	0,825%	0,850%	0,875%	0,900%	

3.3. Strategi BPKPD Kota Binjai dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah/perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ketahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka mewujudkan Misi keempat **“Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif”**, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Binjai menetapkan arah strategis yang berfokus pada penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah. Strategi ini tertuang

secara sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) melalui tujuan utama, yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPKPD Kota Binjai menetapkan sejumlah sasaran yang terukur dan realistis, di antaranya adalah peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang daerah, peningkatan kinerja perangkat daerah, serta penguatan kapasitas aparatur pengelola keuangan. Masing-masing sasaran diuraikan ke dalam strategi dan arah kebijakan yang saling berkaitan dan saling mendukung.

Strategi-strategi tersebut difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah, penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, asset dan pendapatan daerah, pengelolaan aset daerah yang efisien dan produktif. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas SDM dan ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi pilar penting dalam menjamin integritas dan kredibilitas laporan keuangan daerah. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, BPKPD Kota Binjai berkomitmen untuk menjalankan fungsinya secara efektif demi mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang akuntabel, efisien, dan berdaya saing.

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPKPD Kota Binjai

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penyelenggaraan pengelolaan keuangan berbasis SIPD yang terintegrasi
		Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
		Meningkatkan pengelolaan aset milik daerah	Melanjutkan legalisasi aset dan digitalisasi pengelolaan aset daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

3.4. Arah Kebijakan BPKPD Kota Binjai dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ketahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Binjai menetapkan arah kebijakan yang berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam regulasi nasional serta diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.3. Arah Kebijakan BPKPD Kota Binjai

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
2	Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem keuangan daerah	Penyelenggaraan pengelolaan keuangan berbasis SIPD yang terintegrasi
3	Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Mengoptimalkan efektifitas pengelolaan aset daerah	Melanjutkan legalisasi aset dan digitalisasi pengelolaan aset daerah
4	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual secara menyeluruh

BAB IV**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan**

Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai merupakan program prioritas yang tercantum pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kota Binjai. Program dan indikator kinerja (outcome) serta indikasi pagu anggaran selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kota Binjai sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kota Binjai maka program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 adalah program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan, strategi dan kebijakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPJMD Kota Binjai. Selain itu, dilaksanakan pula program-program rutin lainnya sebagai penunjang pencapaian kinerja program prioritas. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKPD Kota Binjai Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan BPKPD Kota Binjai Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kapasitas Perencanaan dan Keuangan Daerah						
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah			Opini BPK atas Laporan Keuangan	
			Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Dokumen rencana anggaran daerah yang tersusun dan peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran.	Jumlah Dokumen dan Orang yang terbina dalam Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Tersusunnya dokumen dan laporan pengelolaan perbendaharaan serta meningkatnya kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.	Jumlah Dokumen, laporan dan Orang yang terbina dalam Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan		Jumlah Dokumen, Laporan dan Orang yang terbina dalam kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
				Tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan serta meningkatnya kapasitas SDM di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
					Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya kegiatan penunjang yang mendukung pelaksanaan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah laporan Kegiatan Penunjang Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen dan Orang yang terbina dalam Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya tata kelola aset daerah		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
				Tersusunnya dokumen dan laporan pengelolaan barang milik daerah yang akurat dan tepat waktu, serta terbina dan terlatihnya sumber daya manusia yang mengelola barang milik daerah.	Jumlah Dokumen, Laporan dan Orang yang terbina dalam Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah
					Jumlah Standar Harga yang Disusun	Penyusunan Standar Harga
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	
			Meningkatnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		Persentase Penerapan Sistem Informasi keuangan berbasis Digital	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Tata kelola pendapatan daerah	Tersusunnya dokumen, laporan serta tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Dokumen, Laporan, Unit, Obyek Pajak, dan Layanan dalam Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Binjai dirumuskan secara sistematis melalui perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang merupakan hasil *cascading* langsung dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis. Setiap program dan kegiatan disusun untuk menghasilkan output dan outcome yang terukur, serta secara konsisten berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah.

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan melalui proses yang memperhatikan evaluasi capaian Renstra periode sebelumnya, perubahan regulasi, serta dinamika kebutuhan pelayanan keuangan dan pengelolaan aset di daerah. Keterkaitan antara sasaran, outcome, dan output dijaga secara konsisten untuk menjamin bahwa setiap anggaran yang dialokasikan memiliki nilai manfaat yang nyata bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai dijabarkan dalam tabel 4.2. di bawah ini :

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan BPKPD Kota Binjai dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
			2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Urusan keuangan													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,41	80	17.300.000.000,00	80	17.745.000.000,00	90	18.865.000.000,00	90	19.377.500.000,00	100	20.640.000.000,00	BPKPD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	6 Dokumen	6 Dokumen	90.000.000,00	6 Dokumen	94.500.000,00	6 Dokumen	99.000.000,00	6 Dokumen	103.500.000,00	6 Dokumen	108.000.000,00	BPKPD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.750.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	1 Dokumen	17.250.000,00	1 Dokumen	18.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.750.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	1 Dokumen	17.250.000,00	1 Dokumen	18.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.750.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	1 Dokumen	17.250.000,00	1 Dokumen	18.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.750.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	1 Dokumen	17.250.000,00	1 Dokumen	18.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.750.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	1 Dokumen	17.250.000,00	1 Dokumen	18.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.750.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	1 Dokumen	17.250.000,00	1 Dokumen	18.000.000,00	BPKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang, Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan	87 Orang/Bulan, 12 Dokumen, 18 Laporan	90 Orang /Bulan, 12 Dokumen, 18 Laporan	12.850.000.000,00	90 Orang /Bulan, 12 Dokumen, 18 Laporan	13.492.500.000,00	90 Orang /Bulan, 12 Dokumen, 18 Laporan	14.135.000.000,00	90 Orang /Bulan, 12 Dokumen, 18 Laporan	14.777.500.000,00	90 Orang /Bulan, 12 Dokumen, 18 Laporan	15.420.000.000,00	BPKPD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 orang/bulan	90 orang/bulan	12.500.000.000,00	90 orang/bulan	13.125.000.000,00	90 orang/bulan	13.750.000.000,00	90 orang/bulan	14.375.000.000,00	90 orang/bulan	15.000.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	12 Dokumen	315.000.000,00	12 Dokumen	330.000.000,00	12 Dokumen	345.000.000,00	12 Dokumen	360.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	50.000.000,00	18 Laporan	52.500.000,00	18 Laporan	55.000.000,00	18 Laporan	57.500.000,00	18 Laporan	60.000.000,00	BPKPD
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	2 Laporan	21.000.000,00	2 Laporan	22.000.000,00	2 Laporan	23.000.000,00	2 Laporan	24.000.000,00	BPKPD

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.500.000,00	1 Laporan	11.000.000,00	1 Laporan	11.500.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	BPKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 laporan	10.000.000,00	1 laporan	10.500.000,00	1 laporan	11.000.000,00	1 laporan	11.500.000,00	1 laporan	12.000.000,00	BPKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit, Paket, Dokumen, Orang dan Pegawai di kegiatan administrasi kepegawaian	0 Unit 0 Paket 0 Dokumen 8 Orang	90 Unit 1 Paket 102 Dokumen 16 Orang	490.000.000,00	0 Unit 0 Paket 102 Dokumen 16 Orang	304.500.000,00	90 Unit 1 Paket 102 Dokumen 16 Orang	539.000.000,00	0 Unit 0 Paket 102 Dokumen 16 Orang	333.500.000,00	90 Unit 1 Paket 102 Dokumen 16 Orang	588.000.000,00	BPKPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	90 Unit	100.000.000,00	0 Unit	0,00	90 Unit	110.000.000,00	0 Unit	0,00	90 Unit	120.000.000,00	BPKPD
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0 Paket	0,00	1 Paket	110.000.000,00	0 Paket	0,00	1 Paket	120.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	12 Dokumen	31.500.000,00	12 Dokumen	33.000.000,00	12 Dokumen	34.500.000,00	12 Dokumen	36.000.000,00	BPKPD
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	90 Dokumen	60.000.000,00	90 Dokumen	63.000.000,00	90 Dokumen	66.000.000,00	90 Dokumen	69.000.000,00	90 Dokumen	72.000.000,00	BPKPD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	8 Orang	100.000.000,00	8 Orang	105.000.000,00	8 Orang	110.000.000,00	8 Orang	115.000.000,00	8 Orang	120.000.000,00	BPKPD
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	8 Orang	100.000.000,00	8 Orang	105.000.000,00	8 Orang	110.000.000,00	8 Orang	115.000.000,00	8 Orang	120.000.000,00	BPKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan di kegiatan Administrasi Umum	10 Paket 12 Dokumen 24 Laporan	8 Paket 12 Dokumen 24 Laporan	1.750.000.000,00	8 Paket 12 Dokumen 24 Laporan	1.837.500.000,00	8 Paket 12 Dokumen 24 Laporan	1.925.000.000,00	8 Paket 12 Dokumen 24 Laporan	2.012.500.000,00	8 Paket 12 Dokumen 24 Laporan	2.100.000.000,00	BPKPD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	1 Paket	63.000.000,00	1 Paket	66.000.000,00	1 Paket	69.000.000,00	1 Paket	72.000.000,00	BPKPD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	500.000.000,00	4 Paket	525.000.000,00	4 Paket	550.000.000,00	4 Paket	575.000.000,00	4 Paket	600.000.000,00	BPKPD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	250.000.000,00	2 Paket	262.500.000,00	2 Paket	275.000.000,00	2 Paket	287.500.000,00	2 Paket	300.000.000,00	BPKPD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	1 Paket	157.500.000,00	1 Paket	165.000.000,00	1 Paket	172.500.000,00	1 Paket	180.000.000,00	BPKPD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	12 Dokumen	31.500.000,00	12 Dokumen	33.000.000,00	12 Dokumen	34.500.000,00	12 Dokumen	36.000.000,00	BPKPD
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	12 Laporan	63.000.000,00	12 Laporan	66.000.000,00	12 Laporan	69.000.000,00	12 Laporan	72.000.000,00	BPKPD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00	12 Laporan	735.000.000,00	12 Laporan	770.000.000,00	12 Laporan	805.000.000,00	12 Laporan	840.000.000,00	BPKPD

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
			2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit dan Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	0 Unit 0 Paket	7 Unit 1 Paket	400.000.000,00	6 Unit 1 Paket	210.000.000,00	3 Unit 0 Paket	275.000.000,00	6 Unit 0 Paket	172.500.000,00	6 Unit 0 Paket	360.000.000,00	BPKPD
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	52.500.000,00	2 Unit	55.000.000,00	2 Unit	57.500.000,00	2 Unit	60.000.000,00	BPKPD
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0,00	1 Unit	220.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	240.000.000,00	BPKPD
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	52.500.000,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	60.000.000,00	BPKPD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	4 Unit	100.000.000,00	4 Unit	105.000.000,00	0 Unit	0,00	4 Unit	115.000.000,00	4 Unit	0,00	BPKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	36 Laporan	36 Laporan	950.000.000,00	36 Laporan	997.500.000,00	36 Laporan	1.045.000.000,00	36 Laporan	1.092.500.000,00	36 Laporan	1.140.000.000,00	BPKPD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	12 Laporan	262.500.000,00	12 Laporan	275.000.000,00	12 Laporan	287.500.000,00	12 Laporan	300.000.000,00	BPKPD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	12 Laporan	525.000.000,00	12 Laporan	550.000.000,00	12 Laporan	575.000.000,00	12 Laporan	600.000.000,00	BPKPD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	200.000.000,00	12 laporan	210.000.000,00	12 laporan	220.000.000,00	12 laporan	230.000.000,00	12 laporan	240.000.000,00	BPKPD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	150 Unit	150 Unit	750.000.000,00	150Unit	787.500.000,00	155Unit	825.000.000,00	155 Unit	862.500.000,00	155 Unit	900.000.000,00	BPKPD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	4 Unit	157.500.000,00	4 Unit	165.000.000,00	4 Unit	172.500.000,00	4 Unit	180.000.000,00	BPKPD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	100.000.000,00	90 Unit	105.000.000,00	90 Unit	110.000.000,00	90 Unit	115.000.000,00	90 Unit	120.000.000,00	BPKPD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	210.000.000,00	1 Unit	220.000.000,00	1 Unit	230.000.000,00	1 Unit	240.000.000,00	BPKPD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	55 Unit	55 Unit	300.000.000,00	55 Unit	315.000.000,00	60 Unit	330.000.000,00	60 Unit	345.000.000,00	60 Unit	360.000.000,00	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	42,90%	35,00%	25.700.000.000,00	30,00%	26.985.000.000,00	30,00%	28.270.000.000,00	30,00%	29.555.000.000,00	30,00%	30.840.000.000,00	BPKPD
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur pelayanan Publik	11,57%	35%		40%		40%		40%		40%		
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	89,9%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Penurunan SILPA	1,22%	1,00%		0,90%		0,80%		0,70%		0,60%		
	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen dan Orang yang terbina dalam Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	8 Dokumen 41 Orang	13 Dokumen 43 Orang	1.950.000.000,00	13 Dokumen 43 Orang	2.047.500.000,00	13 Dokumen 43 Orang	2.145.000.000,00	13 Dokumen 43 Orang	2.242.500.000,00	13 Dokumen 43 Orang	2.340.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	157.500.000,00	2 Dokumen	165.000.000,00	2 Dokumen	172.500.000,00	2 Dokumen	180.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	157.500.000,00	2 Dokumen	165.000.000,00	2 Dokumen	172.500.000,00	2 Dokumen	180.000.000,00	BPKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	115.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	BPKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	115.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	2 Dokumen	420.000.000,00	2 Dokumen	440.000.000,00	2 Dokumen	460.000.000,00	2 Dokumen	480.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	2 Dokumen	420.000.000,00	2 Dokumen	440.000.000,00	2 Dokumen	460.000.000,00	2 Dokumen	480.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	52.500.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	57.500.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	BPKPD
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	0 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	105.000.000,00	2 Dokumen	110.000.000,00	2 Dokumen	115.000.000,00	2 Dokumen	120.000.000,00	BPKPD
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	43 Orang	500.000.000,00	43 Orang	525.000.000,00	43 Orang	550.000.000,00	43 Orang	575.000.000,00	43 Orang	600.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen, laporan dan Orang yang terbina dalam Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5 Dokumen 0 Laporan 10 Orang	7 Dokumen 1 Laporan 43 Orang	1.650.000.000,00	7 Dokumen 1 Laporan 43 Orang	1.732.500.000,00	7 Dokumen 1 Laporan 43 Orang	1.815.000.000,00	7 Dokumen 1 Laporan 43 Orang	1.897.500.000,00	7 Dokumen 1 Laporan 43 Orang	1.980.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	210.000.000,00	1 Dokumen	220.000.000,00	1 Dokumen	230.000.000,00	1 Dokumen	240.000.000,00	BPKPD
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	262.500.000,00	1 Dokumen	275.000.000,00	1 Dokumen	287.500.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	BPKPD
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	115.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	BPKPD
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	1 Dokumen	420.000.000,00	1 Dokumen	440.000.000,00	1 Dokumen	460.000.000,00	1 Dokumen	480.000.000,00	BPKPD
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	115.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	BPKPD

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
			2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan FihakKetiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	210.000.000,00	1 Laporan	220.000.000,00	1 Laporan	230.000.000,00	1 Laporan	240.000.000,00	BPKPD
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	115.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	BPKPD
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	52.500.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	57.500.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	BPKPD
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	43 Orang	250.000.000,00	43 Orang	262.500.000,00	43 Orang	275.000.000,00	43 Orang	287.500.000,00	43 Orang	300.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen, Laporan dan Orang yang terbina dalam kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	0 Dokumen 2 Laporan 178 Orang	7 Dokumen 3 Laporan 178 Orang	1.700.000.000,00	7 Dokumen 3 Laporan 178 Orang	1.785.000.000,00	7 Dokumen 3 Laporan 178 Orang	1.870.000.000,00	7 Dokumen 3 Laporan 178 Orang	1.955.000.000,00	7 Dokumen 3 Laporan 178 Orang	2.040.000.000,00	BPKPD
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	105.000.000,00	1 Laporan	110.000.000,00	1 Laporan	115.000.000,00	1 Laporan	120.000.000,00	BPKPD
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	115.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	BPKPD
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	1 Laporan	367.500.000,00	1 Laporan	385.000.000,00	1 Laporan	402.500.000,00	1 Laporan	420.000.000,00	BPKPD
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	1 Laporan	420.000.000,00	1 Laporan	440.000.000,00	1 Laporan	460.000.000,00	1 Laporan	480.000.000,00	BPKPD
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	115.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	BPKPD

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota												
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	52.500.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	57.500.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	BPKPD
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	0 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	2 Dokumen	262.500.000,00	2 Dokumen	275.000.000,00	2 Dokumen	287.500.000,00	2 Dokumen	300.000.000,00	BPKPD
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	52.500.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	57.500.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	BPKPD
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	52.500.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	57.500.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	BPKPD
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	178 Orang	178 Orang	250.000.000,00	178 Orang	262.500.000,00	178 Orang	275.000.000,00	178 Orang	287.500.000,00	178 Orang	300.000.000,00	BPKPD
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Penunjang Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 laporan	2 laporan	20.100.000.000,00	2 laporan	21.105.000.000,00	2 laporan	22.110.000.000,00	2 laporan	23.115.000.000,00	2 laporan	24.120.000.000,00	BPKPD
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000.000,00	1 Laporan	21.000.000.000,00	1 Laporan	22.000.000.000,00	1 Laporan	23.000.000.000,00	1 Laporan	24.000.000.000,00	BPKPD
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	105.000.000,00	1 Laporan	110.000.000,00	1 Laporan	115.000.000,00	1 Laporan	120.000.000,00	BPKPD
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen dan Orang yang terbina dalam Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah	0 Dokumen 0 Orang	1 Dokumen 43 Orang	300.000.000,00	1 Dokumen 43 Orang	315.000.000,00	1 Dokumen 43 Orang	330.000.000,00	1 Dokumen 43 Orang	345.000.000,00	1 Dokumen 43 Orang	360.000.000,00	BPKPD
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	115.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	BPKPD
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang	43 Orang	200.000.000,00	43 Orang	210.000.000,00	43 Orang	220.000.000,00	43 Orang	230.000.000,00	43 Orang	240.000.000,00	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	-2,16%	-1,50%	900.000.000,00	-0,50%	945.000.000,00	0,50%	990.000.000,00	1,00%	1.035.000.000,00	2,00%	1.080.000.000,00	BPKPD

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen, Laporan dan Orang yang terbina dalam Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen 4 Laporan 41 Orang	2 Dokumen 5 Laporan 43 Orang	900.000.000,00	2 Dokumen 5 Laporan 43 Orang	945.000.000,00	2 Dokumen 5 Laporan 43 Orang	990.000.000,00	2 Dokumen 5 Laporan 43 Orang	1.035.000.000,00	2 Dokumen 5 Laporan 43 Orang	1.080.000.000,00	BPKPD
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	262.500.000,00	1 Dokumen	275.000.000,00	1 Dokumen	287.500.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	BPKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	210.000.000,00	1 Laporan	220.000.000,00	1 Laporan	230.000.000,00	1 Laporan	240.000.000,00	BPKPD
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	52.500.000,00	1 Laporan	55.000.000,00	1 Laporan	57.500.000,00	1 Laporan	60.000.000,00	BPKPD
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	105.000.000,00	1 Laporan	110.000.000,00	1 Laporan	115.000.000,00	1 Laporan	120.000.000,00	BPKPD
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	52.500.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	57.500.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	BPKPD
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	52.500.000,00	1 Laporan	55.000.000,00	1 Laporan	57.500.000,00	1 Laporan	60.000.000,00	BPKPD
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	157.500.000,00	1 Laporan	165.000.000,00	1 Laporan	172.500.000,00	1 Laporan	180.000.000,00	BPKPD
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	43 Orang	50.000.000,00	43 Orang	52.500.000,00	43 Orang	55.000.000,00	43 Orang	57.500.000,00	43 Orang	60.000.000,00	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	12,14%	12,50%	6.400.000.000,00	13,00%	6.720.000.000,00	13,50%	7.040.000.000,00	14,00%	7.360.000.000,00	14,50%	7.680.000.000,00	BPKPD
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	99,96%	100%		100%		100%		100%				
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100%	100%		100%		100%		100%				
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen, Laporan, Unit, Obyek Pajak, dan Layanan dalam Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100.009 Dokumen 6 Laporan 62 Unit 9.000 Obyek Pajak 3.540 Layanan	100.013 Dokumen 7 Laporan 65 Unit 9.000 Obyek Pajak 3.600 Layanan	6.400.000.000,00	100.013 Dokumen 7 Laporan 65 Unit 9.000 Obyek Pajak 3.600 Layanan	6.720.000.000,00	100.013 Dokumen 7 Laporan 65 Unit 9.000 Obyek Pajak 3.700 Layanan	7.040.000.000,00	100.013 Dokumen 7 Laporan 65 Unit 9.000 Obyek Pajak 3.700 Layanan	7.360.000.000,00	100.013 Dokumen 7 Laporan 65 Unit 9.000 Obyek Pajak 3.700 Layanan	7.680.000.000,00	BPKPD

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	115.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	BPKPD
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	115.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	BPKPD
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	600.000.000,00	2 Laporan	630.000.000,00	2 Laporan	660.000.000,00	2 Laporan	690.000.000,00	2 Laporan	720.000.000,00	BPKPD
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	62 Unit	65 Unit	1.500.000.000,00	65 Unit	1.575.000.000,00	65 Unit	1.650.000.000,00	65 Unit	1.725.000.000,00	65 Unit	1.800.000.000,00	BPKPD
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	2 Laporan	210.000.000,00	2 Laporan	220.000.000,00	2 Laporan	230.000.000,00	2 Laporan	240.000.000,00	BPKPD
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	450.000.000,00	2 Laporan	472.500.000,00	2 Laporan	495.000.000,00	2 Laporan	517.500.000,00	2 Laporan	540.000.000,00	BPKPD
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	9.000 Obyek Pajak	9.000 Obyek Pajak	600.000.000,00	9.000 Obyek Pajak	630.000.000,00	9.000 Obyek Pajak	660.000.000,00	9.000 Obyek Pajak	690.000.000,00	9.000 Obyek Pajak	720.000.000,00	BPKPD
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	115.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	BPKPD
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3.540 Layanan	3.600 Layanan	700.000.000,00	3.600 Layanan	735.000.000,00	3.700 Layanan	770.000.000,00	3.700 Layanan	805.000.000,00	3.700 Layanan	840.000.000,00	BPKPD
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	630.000.000,00	1 Dokumen	660.000.000,00	1 Dokumen	690.000.000,00	1 Dokumen	70.000.000,00	BPKPD
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100.000 Dokumen	100.000 Dokumen	650.000.000,00	100.000 Dokumen	682.500.000,00	100.000 Dokumen	715.000.000,00	100.000 Dokumen	747.500.000,00	100.000 Dokumen	780.000.000,00	BPKPD
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	115.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	BPKPD
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	500.000.000,00	8 Dokumen	525.000.000,00	8 Dokumen	550.000.000,00	8 Dokumen	575.000.000,00	8 Dokumen	600.000.000,00	BPKPD
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	105.000.000,00	1 Laporan	110.000.000,00	1 Laporan	115.000.000,00	1 Laporan	120.000.000,00	BPKPD
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	105.000.000,00	1 Laporan	110.000.000,00	1 Laporan	115.000.000,00	1 Laporan	120.000.000,00	BPKPD

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Binjai serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, BPKPD Kota Binjai merumuskan sejumlah program prioritas beserta kegiatan dan subkegiatan yang menjadi penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra 2025–2029. Program dan kegiatan tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi target kinerja jangka menengah, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah secara menyeluruh.

Program prioritas dalam Renstra ini terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori utama, yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Masing-masing program didukung oleh kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan kewenangan perangkat daerah. Keseluruhan subkegiatan ini selanjutnya dijabarkan dalam tabel 4.3. berikut :

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola akuntansi, pelaporan, perbendaharaan, dan anggaran	
	Efisiensi dalam Belanja Operasional dan Peningkatan Alokasi untuk Pembangunan (RPJMD)		
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan FihakKetiga (PFK)
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Penyusunan Standar Harga
			Penatausahaan Barang Milik Daerah
			Penilaian Barang Milik Daerah
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan	
	Optimalisasi Penerimaan Berkelanjutan melalui Kesadaran Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah (RPJMD)		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
			Penetapan Wajib Pajak Daerah
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
			Penagihan Pajak Daerah
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Selain mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Binjai, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai bersama Pemerintah Kota Binjai juga turut mendukung PHTC dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.4. Dukungan BPKPD Kota Binjai Terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI	DUKUNGAN BPKPD KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG		
4.Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)	2025	Identifikasi dan pemetaan pelayanan publik yang akan di digitalisasi 1. Pemetaan layanan publik yang akan didigitalisasi, Audit kesiapan infrastruktur dan SDM dan kebijakan pendukung 2. Penyusunan roadmap dan desain awal sistem Layanan digital. Lokasi: ☐ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Dinas Kominfo	DPMPTSP Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Bapenda Disperindag ESDM BPSDM Biro Adpem BUMD: PDAM, Bank Sumut	1. Penyiapan kebijakan/ regulasi di tingkat Provinsi/ Pemda Kabupaten/Kota. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/ kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota. 4. Penentuan lokasi.	1.Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di BPKPD kota Binjai. 2.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di BPKPD Kota Binjai.

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI	DUKUNGAN BPKPD KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG		
	2026	Pembangunan integrasi portal aplikasi 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 4. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. Lokasi Kegiatan: ☐ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infrastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi	1. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di BPKPD Kota Binjai. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di BPKPD Kota Binjai
	2027	Pengembangan dan penambahan 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 4. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 5. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infrastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi	1. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di BPKPD Kota Binjai. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di BPKPD Kota Binjai

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI	DUKUNGAN BPKPD KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG		
	2028	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infrastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi	1. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di BPKPD Kota Binjai. 2. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di BPKPD Kota Binjai
	2029	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infrastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi	1. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di BPKPD Kota Binjai. 2. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di BPKPD Kota Binjai

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI	DUKUNGAN BPKPD KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG		
	2030	Evaluasi dan Monitoring 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi kegiatan: - 33 Kabupaten/Kota			1. Penyiapan dan penguatan infrastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota. 4. Penentuan lokasi	1. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di BPKPD Kota Binjai. 2. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di BPKPD Kota Binjai

Tabel 4.5. Dukungan BPKPD Kota Binjai terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI	DUKUNGAN BPKPD KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG		
PP 5 PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH						
18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	2025	- Inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum optimal, serta potensi pemanfaatan - Penyusunan skema/proses bisnis pemanfaatan aset BMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	BKAD	Bapenda Provsu : Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui pemanfaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi Bappelitbang Provsu : Dukungan dalam penyusunan	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan	Dukungan BPKPD Kota Binjai pada pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI	DUKUNGAN BPKPD KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG		
		- Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi - Proses digitalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah		konsep dan perencanaan Diskominfo : Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi OPD Pengguna BMD : Dukungan dalam inventarisir dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD	Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa)	Pemerintah Setempat (Kelurahan)

Dalam rangka mengukur pencapaian kinerja strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Binjai selama periode 2025–2030, telah ditetapkan sejumlah indikator kinerja utama (IKU) yang bersifat lintas program dan mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan di bidang keuangan, asset dan pendapatan daerah. Indikator ini dipilih karena mampu merepresentasikan kinerja kelembagaan BPKPD secara menyeluruh.

Target tahunan untuk masing-masing indikator dirancang secara bertahap dan realistis, sejalan dengan visi peningkatan kualitas tata kelola keuangan, asset dan pendapatan daerah yang diemban oleh BPKPD Kota Binjai.

Tabel Indikator Kinerja Utama BPKPD Kota Binjai Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Peringkat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	

Untuk memastikan tercapainya indikator kinerja utama (IKU) secara konsisten dan terukur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Binjai menetapkan sejumlah indikator kinerja kunci (IKK) yang berfungsi sebagai pendorong utama dalam mendukung pencapaian IKU tersebut. Indikator-indikator ini merepresentasikan variabel teknis dan operasional yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan program strategis serta efektivitas manajemen keuangan, aset dan pendapatan daerah.

Tabel 4.7. Indikator Kinerja Kunci BPKPD Kota Binjai Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	31	30	29	28	27	24	
2	Rasio PAD	Persen	12,25	12,50	13,00	13,50	14,00	14,50	
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	60,00	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50	
4	Opini Laporan Keuangan	Peringkat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00	6,50	
6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	35,00	32,50	30,00	27,50	25,50	22,50	
7	Manajemen Aset	Bobot	4	4	4	4	4	4	
8	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	1,10	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	
9	Nilai AKIP perangkat daerah	Nilai	80	80	80	90	90	100	
10	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persen	40,00	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
11	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	26,75	35	40	40	40	40	
12	Persentase Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD/Perubahan APBD/Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Realisasi Anggaran Belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Penurunan SILPA	Persen	1,10	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	
15	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	-1,75	-1,50	-0,50	0,50	1,00	2,00	
17	Persentase Tanah Milik Pemko Binjai yang disertifikasi	Persen	51,51	53,68	55,84	58,01	60,18	62,34	
18	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	-10,23	-9,24	-8,25	-7,26	-6,27	-5,28	
19	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	12,25	12,50	13,00	13,50	14,00	14,50	
20	Cakupan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
21	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persen	100	100	100	100	100	100	

BAB V**PENUTUP****5.1. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan yang berdimensi 5 tahun-an dalam rangka mengoperasionalkan RPJMD Kota Binjai yang diselaraskan dengan tugas, fungsi dan tata kerja dalam bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah.

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman bagi masing-masing bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai dalam rangka menyusun program/kegiatan tahunan dengan lebih fokus pada output dan outcome yang ditargetkan guna mendukung mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif. Sehingga program/kegiatan yang disusun Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai sudah memadai dan mendukung untuk mencapai sasaran hasil yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Binjai.

5.2. Pelaksanaan Pengendalian

Sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian perencanaan pembangunan daerah menjadi tanggung jawab kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Binjai. Namun, untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya di tingkat perangkat daerah, BPKPD sebagai pengelola keuangan, aset dan pendapatan daerah perlu membangun sistem pengendalian internal yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Di samping itu, pengendalian juga diarahkan untuk memastikan kesesuaian antara indikator kinerja yang ditetapkan dengan hasil nyata pembangunan bidang keuangan, aset dan pendapatan daerah. Pengendalian dilaksanakan secara kontinyu dan partisipatif melalui mekanisme pemantauan, evaluasi, serta manajemen risiko pada seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan program.

5.3. Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Evaluasi perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang sesuai dengan visi, misi, dan sasaran strategis BPKPD Kota Binjai yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029. Dalam konteks ini, evaluasi berfungsi sebagai alat pengendali untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) dengan

dokumen perencanaan tahunan (RKPD), serta konsistensi antar kebijakan daerah dan nasional.

Selain evaluasi internal, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan juga menjadi aspek penting dalam proses evaluatif yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan juga berfungsi sebagai refleksi terhadap kualitas tata kelola dan akuntabilitas publik.

Melalui evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, BPKPD Kota Binjai diharapkan mampu mengidentifikasi area perbaikan, menetapkan kebijakan penyesuaian yang tepat, serta memastikan bahwa setiap langkah pembangunan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik di bidang keuangan, aset dan pendapatan daerah.



**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI**

**ERWIN TOGA TP. PURBA, S.Sos, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681210 198910 1 001**